



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 20 April 2026

Halaman: 5

► KEBIJAKAN PEMERINTAH

Selektif, Hanya 42 ASN yang Jalani WFH

UMBULHARJO—Pemkot Jogja memastikan kebijakan *work from home* (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) diterapkan secara selektif. Pada pelaksanaan hari kedua WFH, Jumat (17/4), hanya 0,59% ASN di Pemkot Jogja yang menjalankan WFH. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja, Sarwanto, menuturkan pelaksanaan WFH hanya dilakukan di lima organisasi perangkat daerah (OPD) dari total 50 OPD yang ada di Pemkot Jogja. Lima OPD tersebut terdiri dari Badan Kesbangpol, Bagian Organisasi, Bappeda, BKPSDM, serta Kemantren Gondomanan. Sementara itu dari segi jumlah menurutnya dari total ASN Pemkot Jogja mencapai 7.115 pegawai, hanya 42 orang atau sekitar 0,59% yang menjalankan WFH.

Sarwanto menjelaskan, sistem pengawasan terhadap ASN yang melakukan WFH pun dilakukan secara berjenjang. ASN yang akan menjalankan WFH wajib mengajukan rencana kerja pada hari Kamis untuk diverifikasi atasan. Selanjutnya, pada Jumat sore, pegawai harus melaporkan hasil pekerjaan yang kembali diverifikasi.

Selain itu, jajarannya juga melakukan uji petik secara acak guna memastikan kedisiplinan ASN selama menjalankan WFH. Dia menegaskan, ASN yang tidak mampu memenuhi target dan komitmen kerja tidak akan diberikan izin WFH. "Dengan mekanisme ini pekerjaan tetap terpantau dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya, Minggu (19/4).

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Jogja, Dedi Budiono, menegaskan pekerjaan yang dilakukan secara jarak jauh umumnya bersifat administratif dan tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Dengan begitu, layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. "Mayoritas pekerjaan yang dilakukan secara WFH tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik, sehingga layana tetap berjalan 100 persen," katanya.

Dia mencontohkan, di Badan Kesbangpol Kota Jogja hanya ada satu pegawai yang menjalani WFH. Meski begitu, pekerjaan strategis tetap diselesaikan, seperti penyusunan instrumen survei kepuasan kinerja kepala daerah, analisis *pre-test* dan *post-test* pendidikan politik perempuan, dan rekapitulasi pemantauan situasi politik daerah. (Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005